

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024
Kantor Pel

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER
(UAKPA)**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024

ahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan N
egaradan Lelang Jember Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negar
adan Lelang Jember Laporan Keuangan Tahun Ang
garan 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara da
n Lelang Jember Laporan Keuangan Tahun Anggara
n 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lel

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jember, 07 Mei 2025
Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Nendro



DAFTAR ISI

	Hal
i. Kata Pengantar	2
ii. Daftar Isi	3
iii. Pernyataan Tanggung Jawab	5
iv. Ringkasan Laporan Keuangan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN SLAMET RIYADI NO. 344A, PATRANG, JEMBER
TELEPON (0331) 428758; FAKSIMILE (0331) 428760; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jember, 07 Mei 2025

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Nendro



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,991,097,368 mencapai 75 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp8,003,939,000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3,090,848,868 atau mencapai 86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3,586,636,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp25,606,811,368 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1,278,550,384 dan Aset Tetap (netto) sebesar Rp24,328,260,984.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,268,253,581 dan Rp24,338,557,787.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5,974,855,659, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2,714,461,121 sehingga terdapat Surplus dari

Kegiatan Operasional senilai Rp3,260,394,538. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp0) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3,260,394,538.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp23,967,999,249 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3,260,394,538 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp0 serta ditambah Lain-lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp 2,889,836,000), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 24,338,557,787.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% thd Angg	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	8.003.939.000	5.991.097.368	74,85	6.663.332.518
JUMLAH PENDAPATAN		8.003.939.000	5.991.097.368	74,85	6.663.332.518
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.638.528.000	2.225.355.133	84,34	1.970.422.250
Belanja Modal	B.5	948.108.000	865.493.735	91,29	125.097.670
JUMLAH BELANJA		3.586.636.000	3.090.848.868	86,18	2.095.519.920

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER**
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1	-	5,153
kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1,230,900,000	35,893,417
Persediaan	C.3	47,650,384	39,458,090
Jumlah Aset Lancar		1,278,550,384	75,356,660
ASET TETAP			
Tanah	C.4	15,791,512,000	15,791,512,000
Peralatan dan Mesin	C.5	5,511,719,165	4,972,829,305
Gedung dan Bangunan	C.6	9,607,275,425	9,268,771,550
Aset Tetap Lainnya	C.7	5,365,680	5,365,680
Akumulasi Penyusutan	C.8	(6,587,611,286)	(6,088,430,711)
Jumlah Aset Tetap		24,328,260,984	23,950,047,824
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	54,712,190	54,712,190
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(54,712,190)	(54,712,190)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		25,606,811,368	24,025,404,484
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	1,245,998,692	51,386,902
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	22,254,889	6,018,333
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,268,253,581	57,405,235
JUMLAH KEWAJIBAN		1,268,253,581	57,405,235
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	24,338,557,787	23,967,999,249
JUMLAH EKUITAS		24,338,557,787	23,967,999,249
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25,606,811,368	24,025,404,484

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.974.855.659	6.670.559.671
JUMLAH PENDAPATAN		5.974.855.659	6.670.559.671
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	39.388.642	40.717.360
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.156.126.690	1.219.065.915
Beban Pemeliharaan	D.4	452.615.497	311.840.832
Beban Perjalanan Dinas	D.5	568.637.217	402.259.958
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	497.693.075	446.562.740
JUMLAH BEBAN		2.714.461.121	2.420.446.805
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.260.394.538	4.250.112.866
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	-	(654.000)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(654.000)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		3.260.394.538	4.249.458.866
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.10	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		3.260.394.538	4.249.458.866

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	23,967,999,249	24,093,082,825
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	3,260,394,538	4,249,458,866
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	654,000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	654,000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	654,000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(2,889,836,000)	(4,375,196,442)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		370,558,538	(125,083,576)
EKUITAS AKHIR	E.5	24,338,557,787	23,967,999,249

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pagu awal sebesar Rp3.561.172.000 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp3.586.636.000. Revisi DIPA yang dilakukan selama periode TA 2024 sebanyak dua belas kali, yaitu sebagai berikut :

1. Revisi pertama dilaksanakan tanggal 18 Februari 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
2. Revisi kedua dilaksanakan tanggal 04 April 2024 dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
3. Revisi ketiga dilaksanakan tanggal 15 Mei 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
4. Revisi keempat dilaksanakan tanggal 27 Mei 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
5. Revisi kelima dilaksanakan tanggal 10 Juli 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
6. Revisi keenam dilaksanakan tanggal 14 Juli 2024 dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
7. Revisi ketujuh dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
8. Revisi kedelapan dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim

9. Revisi kesembilan dilaksanakan tanggal 06 November 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
10. Revisi kesepuluh dilaksanakan tanggal 14 November dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
11. Revisi kesebelas dilaksanakan tanggal 19 November 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
12. Revisi keduabelas dilaksanakan tanggal 17 Desember 2024 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim

*Tabel B.1. Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran TA
2024*

Uraian	2023		KENAIKAN / PENURUNAN
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.561.172.000	3.586.636.000	0,01
Jumlah Pendapatan	3.561.172.000	3.586.636.000	
Belanja			
Belanja Pegawai	0	0	0,00%
Belanja Barang	2.613.064.000	2.638.528.000	0,97%
Belanja Modal	948.108.000	948.108.000	0,00%
Jumlah Belanja	3.561.172.000	3.586.636.000	

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja barang pada belanja barang non operasional lainnya.

Realisasi

Pendapatan

Rp5,991,097,368

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5,991,097,368 atau mencapai 74,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8,003,939,000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember terdiri dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,003,939,000	5,991,097,368	74.85
Jumlah	8,003,939,000	5,991,097,368	-

Jika dibandingkan nilai nominalnya, maka realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,09 persen dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023.

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,991,097,368	6,663,332,518	(10.09)
Jumlah	5,991,097,368	6,663,332,518	(10.09)

*Realisasi
Belanja Negara
Rp3,090,848,868*

B.2 Belanja

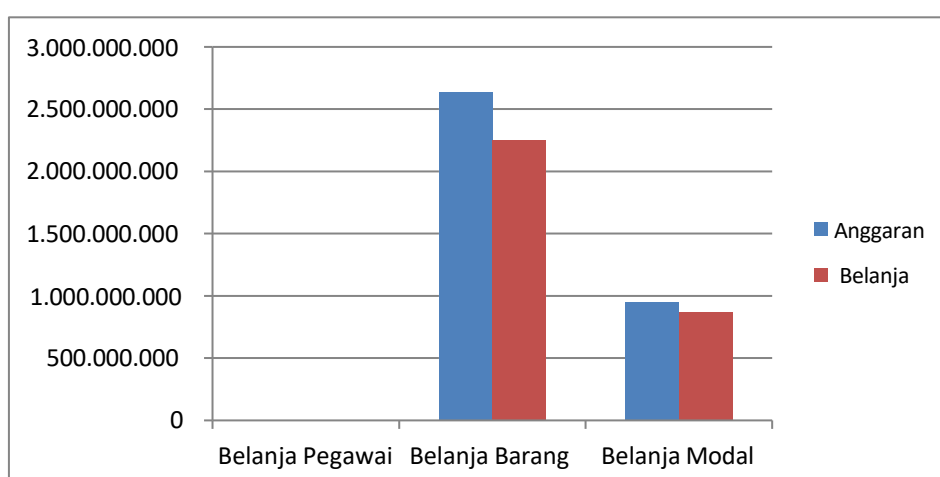
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp3,090,848,868 atau 86,96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3,586,636,000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	2,638,528,000	2,253,555,133	85.41
Belanja Modal	948,108,000	865,493,735	91.29
Jumlah	3,586,636,000	3,119,048,868	86.96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 47,50 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel B.5. Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2,225,355,133	1,970,422,250	12.94
Belanja Modal	865,493,735	125,097,670	591.85
Jumlah	3,090,848,868	2,095,519,920	47.50

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp 0

Tidak terdapat alokasi belanja 51 atau belanja pegawai pada DIPA Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

pada periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023. Hal ini dikarenakan belanja 51 telah ditetapkan terpusat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Belanja Barang
Rp2,225,355,133
3

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,225,355,133 dan Rp1,970,422,250. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,94 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

*Tabel B.7. Perbandingan Belanja Barang
TA 2024 dan TA 2023*

Uraian	2024	2023	Naik / (Turun) %
Belanja Barang Operasional	974.863.313	1.015.376.610	(3,99)
Belanja Barang Non Operasional	8.360.000	15.004.000	(44,28)
Belanja Barang Persediaan	39.388.642	37.899.600	3,93
Belanja Jasa	181.490.464	188.041.250	(3,48)
Belanja Pemeliharaan	452.615.497	311.840.832	45,14
Belanja Perjalanan Dinas	568.637.217	402.259.958	41,36
Realisasi Belanja Bruto	2.225.355.133	1.970.422.250	12,94
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	
Realisasi Belanja Netto	2.225.355.133	1.970.422.250	12,94

Belanja Modal
Rp948,108,000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp865,493,735 dan 125,097,670. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 692 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2023.

*B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.989.860	88.689.670	594%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	338.503.875	36.408.000	930%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0%
Belanja Modal Lainnya	-	-	0%
Belanja Modal BLU	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	865.493.735	125.097.670	692%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	865.493.735	125.097.670	692%

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 adalah sebesar Rp526,989,860 sedangkan TA 2023 adalah sebesar Rp88,689,670, mengalami kenaikan sebesar 594 persen. Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 terdapat belanja modal untuk pembelian kendaraan dinas roda empat.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 adalah sebesar Rp338,503,875 sedangkan TA 2023 adalah sebesar Rp36,408,000, mengalami kenaikan sebesar 930 persen. Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 terdapat belanja modal untuk renovasi rumah negara.

*Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	338.503.875	36.408.000	930%
Peralatan dan Mesin	526.989.860	88.689.670	594%
Jumlah Belanja Kotor	865.493.735	125.097.670	692%
Pengembalian	-	-	0%
Jumlah Belanja	865.493.735	125.097.670	692%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Tabel C.1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan TA 2023*

Keterangan	2024	2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Tabel C.2. Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2024 dan TA 2023*

Uraian	2024	2023
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp47,650,384

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp47,650,384 dan Rp39,458,090. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.3. Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	47,650,384	39,893,417
Jumlah	47,650,384	39,893,417

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp15,791,512,000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15,791,512,000 dan Rp15,791,512,000. Ada pun nilai tanah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.4. Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15.791.512.000
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2024	15.791.512.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Rincian Tanah

No	Luas (m ²)	Uraian	Nilai
1	3,388	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	7,768,486,000
2	2,500	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8,023,026,000
Jumlah			15,791,512,000

Peralatan dan Mesin
Rp5,511,719,165

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5,511,719,165 dan Rp4,972,829,305. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.6. Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5,511,719,165
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer masuk	298,698,188
Koreksi pencatatan	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2024	5,810,417,353
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-4,342,568,911
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,467,848,442

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp9,607,275,425*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp9,607,275,425 dan Rp9,268,771,550. Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.7. Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.268.771.550
Mutasi tambah:	338.503.875
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	9.607.275.425
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.774.052.754)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	7.833.222.671

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp5,365,680*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5,365,680 dan Rp5,365,680.

Aset tetap tersebut berupa Monografi, buku lainnya, lukisan kanvas dan alat musik. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan **C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap

Rp(6,587,611,286)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(6,587,611,286) dan Rp(6,088,430,771).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.9 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.511.719.165	4.813.558.532	698.160.633
2	Gedung dan Bangunan	9.607.275.425	1.774.052.754	7.833.222.671
3	Aset Tetap Lainnya	5.365.680	0	5.365.680
	Akumulasi Penyusutan	15.124.360.270	6.587.611.286	8.536.748.984

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0*

C.10. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Tabel C.10. Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
TA 2024 dan TA 2023*

No	Debitur	2024	2023
1	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Lain-Lain
Rp54,712,190*

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp54,712,190 dan Rp54,712,190. Aset Lain-lain

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.11. Nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2024	54,712,190
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2024	54,712,190
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(54,712,190)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Rp(54,712,190)

C.13 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(54,712,190) dan Rp(54,712,190). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel C.12. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	54.712.190	54.712.190	-
Jumlah	54.712.190	54.712.190	-

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1,245,998,692*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1,245,998,692 dan Rp51,386,902. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.13. Rincian Utang kepada Pihak ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.098.692	Tagihan Listrik dan Telepon bulan Desember 2024
Dana Pihak Ketiga	1.230.900.000	Dana Pihak Ketiga
Total	1.245.998.692	

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp22,254,889*

C.15 Pendapatan Diterima Di Muka

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp22,254,889 dan Rp6,018,333. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang diterima dari pihak ketiga yang telah diterima di muka.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.16 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja.

Ekuitas

Rp24,338,557,787

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24,338,557,787 dan Rp23,967,999,249 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp5,974,855,659

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5,974,855,659 dan Rp6,670,559,671.

Beban Pegawai

Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0%
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	0	0	0%
Beban Uang Makan	0	0	0%
Beban Uang Lembur	0	0	0%
Pengembalian Beban Gaji	0	0	0%
Pengembalian Beban Tunjangan-tunjangan PNS	0	0	0%
Jumlah	0	0	0%

*Beban
Persediaan
Rp39,388,642*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39,388,642 dan Rp40,717,360. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	39,388,642	40,717,360	-3.26%
Jumlah Beban Persediaan	39,388,642	40,717,360	-3.26%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.156,126,690*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.156,126,690 dan Rp1,219,065,915. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp452,615,497*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp452,615,497 dan Rp311,840,832. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp568,637,217*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp568,637,217 dan Rp402,259,958. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp497,693,075*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp497,693,075 dan Rp446,562,740. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
(Rp0)*

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 sebesar (Rp0) dan Rp(654,000)

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp23,967,999,249*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23,967,999,249 dan Rp24,093,082,825.

*Surplus/Defisit
LO
Rp3,260,349,538*

E.2 Surplus /Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3,260,349,538 dan Rp4,249,458,866. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp654,000.

*Selisih
Revaluasi Aset
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0

dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

*Rp(2,889,836,0
00)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(2,889,836,000) dan Rp(4,375,196,442). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir

Rp24,338,557,787

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24,338,557,787 dan Rp23,967,999,249.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada.

F. 2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada.

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5. NERACA PERCOBAAN AKRUAL
6. LRA BELANJA MENURUT AKUN
7. LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

LAPORAN BMN

1. LAPORAN POSISI BMN DI NERACA
2. LAPORAN BARANG INTRAKOMTABEL
3. LAPORAN BARANG GABUNGAN
INTRAKOMTABEL &
EKSTRAKOMTABEL
4. LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMTABEL
5. LAPORAN ASET TAK BERWUJUD
6. LAPORAN AMORTISASI
7. LAPORAN PERSEDIAAN
8. LAPORAN KONSTRUKSI DALAM
PENGGERJAAN
9. CATATAN RINGKAS BM

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:01 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,976,304,947	6,670,559,671	(694,254,724)	(10.408)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,976,304,947	6,670,559,671	(694,254,724)	(10.408)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,976,304,947	6,670,559,671	(694,254,724)	(10.408)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	39,388,642	40,717,360	(1,328,718)	(3.263)
Beban Barang dan Jasa	1,156,126,690	1,219,065,915	(62,939,225)	(5.163)
Beban Pemeliharaan	452,615,497	311,840,832	140,774,665	45.143
Beban Perjalanan Dinas	568,637,217	402,259,958	166,377,259	41.361
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:01 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	497,693,075	446,562,740	51,130,335	11.45
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,714,461,121	2,420,446,805	294,014,316	12.147
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	3,261,843,826	4,250,112,866	(988,269,040)	(23.253)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(654,000)	654,000	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	654,000	(654,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(654,000)	654,000	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3,261,843,826	4,249,458,866	(987,615,040)	(23.241)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	3,261,843,826	4,249,458,866	(987,615,040)	(23.241)

Keterangan :

FINAL

JEMBER, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU NENDRO
NIP 197110061997031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:02 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,967,999,249	24,093,082,825	(125,083,576)	(0.52)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,261,843,826	4,249,458,866	(987,615,040)	(23.24)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	654,000	(654,000)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	654,000	(654,000)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(2,889,836,000)	(4,375,196,442)	1,485,360,442	(33.95)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	372,007,826	(125,083,576)	497,091,402	(397.41)
EKUITAS AKHIR	24,340,007,075	23,967,999,249	372,007,826	1.55

Keterangan :

FINAL

JEMBER, 9 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU NENDRO

NIP 197110061997031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:02 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	5,153	(5,153)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,230,900,000	35,893,417	1,195,006,583	3,329.32
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1,449,288	0	1,449,288	0.00
Persediaan	47,650,384	39,458,090	8,192,294	20.76
JUMLAH ASET LANCAR	1,279,999,672	75,356,660	1,204,643,012	1,598.59
ASET TETAP				
Tanah	15,791,512,000	15,791,512,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,511,719,165	4,972,829,305	538,889,860	10.84
Gedung dan Bangunan	9,607,275,425	9,268,771,550	338,503,875	3.65
Aset Tetap Lainnya	5,365,680	5,365,680	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,587,611,286)	(6,088,430,711)	(499,180,575)	8.20
JUMLAH ASET TETAP	24,328,260,984	23,950,047,824	378,213,160	1.58
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	54,712,190	54,712,190	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,712,190)	(54,712,190)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25,608,260,656	24,025,404,484	1,582,856,172	6.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,245,998,692	51,386,902	1,194,611,790	2,324.74
Pendapatan Diterima Dimuka	22,254,889	6,018,333	16,236,556	269.78
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,268,253,581	57,405,235	1,210,848,346	2,109.30
JUMLAH KEWAJIBAN	1,268,253,581	57,405,235	1,210,848,346	2,109.30
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,340,007,075	23,967,999,249	372,007,826	1.55
JUMLAH EKUITAS	24,340,007,075	23,967,999,249	372,007,826	1.55
JUMLAH EKUITAS	24,340,007,075	23,967,999,249	372,007,826	1.55
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,608,260,656	24,025,404,484	1,582,856,172	6.59

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:02 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

JEMBER, 9 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU NENDRO

NIP 197110061997031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,230,900,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,449,288	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	47,650,384	0
0.0	131111	Tanah	15,791,512,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,511,719,165	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,607,275,425	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,365,680	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,813,558,532
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,774,052,754
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	54,712,190	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	54,712,190
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,098,692
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,230,900,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	22,254,889
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,090,848,868
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,991,097,368	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,412,500
0.0	391111	Ekuitas	0	23,967,999,249
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,327,444
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	4,945,112,433
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	896,565,210
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	122,918,335
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,381,525
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	822,480,719	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,745,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44,761,380	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	64,012,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	650,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	27,609,420	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8,360,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	167,175,306	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,832,365	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	239,103,387	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,143,050	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184,369,060	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	544,977,217	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,660,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (538140) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JEMBER

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:03 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	241,284,624	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	256,408,451	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	39,388,642	0
JUMLAH			40,956,142,621	40,956,142,621

Keterangan :

FINAL

JEMBER, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU NENDRO
NIP 197110061997031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER 538140

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:02 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,586,636,000	3,090,848,868	(495,787,132)	86.18	2,293,823,000	2,095,519,920	(198,303,080)	91.35
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JEMBER, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU NENDRO
NIP 197110061997031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 010
SATUAN KERJA : 538140
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 09/05/25 7:04 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 9/5/25 4:29 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	811,022,000	842,198,000	822,480,719	0	822,480,719	97.66	19,717,281
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7,200,000	7,200,000	6,745,500	0	6,745,500	93.69	454,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,600,000	48,000,000	43,673,380	0	43,673,380	90.99	4,326,620
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	98,568,000	98,568,000	64,012,000	0	64,012,000	64.94	34,556,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14,250,000	14,250,000	650,000	0	650,000	4.56	13,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	958,640,000	1,010,216,000	937,561,599	0	937,561,599	92.81	72,654,401
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	45,727,000	54,144,000	27,609,420	0	27,609,420	50.99	26,534,580
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,400,000	9,618,000	8,360,000	0	8,360,000	86.92	1,258,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	60,127,000	63,762,000	35,969,420	0	35,969,420	56.41	27,792,580
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,000,000	48,000,000	47,580,936	0	47,580,936	99.13	419,064
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	42,000,000	48,000,000	47,580,936	0	47,580,936	99.13	419,064
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	180,000,000	180,000,000	168,631,804	0	168,631,804	93.68	11,368,196
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	24,000,000	12,858,660	0	12,858,660	53.58	11,141,340
522141	Belanja Sewa	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	204,000,000	205,500,000	182,990,464	0	182,990,464	89.05	22,509,536
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	342,088,000	248,959,000	239,103,387	0	239,103,387	96.04	9,855,613
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	67,847,000	67,847,000	29,143,050	0	29,143,050	42.95	38,703,950
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265,821,000	265,821,000	184,369,060	0	184,369,060	69.36	81,451,940
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	675,756,000	582,627,000	452,615,497	0	452,615,497	77.69	130,011,503
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	595,485,000	670,167,000	544,977,217	0	544,977,217	81.32	125,189,783
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,056,000	58,256,000	23,660,000	0	23,660,000	40.61	34,596,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	672,541,000	728,423,000	568,637,217	0	568,637,217	78.06	159,785,783
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,613,064,000	2,638,528,000	2,225,355,133	0	2,225,355,133	84.34	413,172,867
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	541,237,000	541,237,000	526,989,860	0	526,989,860	97.37	14,247,140

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 010
SATUAN KERJA : 538140
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 09/05/25 7:04 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 9/5/25 4:29 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	541,237,000	541,237,000	526,989,860	0	526,989,860	97.37	14,247,140
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	406,871,000	406,871,000	338,503,875	0	338,503,875	83.2	68,367,125
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	406,871,000	406,871,000	338,503,875	0	338,503,875	83.2	68,367,125
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	948,108,000	948,108,000	865,493,735	0	865,493,735	91.29	82,614,265
	JUMLAH BELANJA	3,561,172,000	3,586,636,000	3,090,848,868	0	3,090,848,868	86.18	495,787,132

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 538140

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/25 7:04 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	100,459,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	111,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	23,564,000	0	23,564,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	100,570,000	23,564,000	0	23,564,000	23.43
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	6,658,138,000	4,945,117,586	0	4,945,117,586	74.27
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,239,704,000	895,115,922	0	895,115,922	72.2
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	5,527,000	122,918,335	0	122,918,335	2223.96
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	7,903,369,000	5,963,151,843	0	5,963,151,843	75.45
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,381,525	0	4,381,525	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,381,525	0	4,381,525	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	8,003,939,000	5,991,097,368	0	5,991,097,368	74.85
	JUMLAH PENDAPATAN	8,003,939,000	5,991,097,368	0	5,991,097,368	74.85